

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**



**PT BPR SATYA MITRA ANDALAN  
2019**

## **PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR SATYA MITRA ANDALAN TAHUN 2019**

### **Latar Belakang**

Melewati tahun 2018 dan memasuki tahun 2019, Bank Perkreditan Rakyat Satya Mitra Andalan selanjutnya disebut Bank, terus berupaya melakukan perbaikan terhadap kinerja bank baik lingkup internal operasional sekaligus mencoba melakukan terobosan terobosan, dimana usaha bank mulai tumbuh berkembang walaupun tidak secara drastis. Hal ini merupakan titik perhatian lebih manajemen dengan berkaca pada pengalaman tahun tahun sebelumnya. Beberapa kebijakan bisnis telah diambil guna mengantisipasi kemungkinan tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan yang secara keseluruhan masih lesu, maupun tingkat inflasi yang mungkin saja mempengaruhi daya beli dan gerak pelaku ekonomi mikro yang merupakan target pasar bagi usaha bisnis Bank Satya Mitra Andalan.

Untuk bisnis sendiri terus melakukan langkah ekspansi dan penetrasi bisnis yang diharapkan langsung terhubung dengan konsumen dengan segmentasi pasar yang sesuai dengan kapasitas BPR. Hal ini dibuktikan dengan beberapa langkah promosi Funding maupun Lending serta penajakan kerjasama dengan beberapa BPR terkait dengan pembiayaan bersama (Sindikasi) yang melewati BMPK namun mempunyai prospek usaha yang bagus.

Terkait hal tersebut, BPR Satya Mitra Andalan juga harus mempunyai sarana pendukung agar target bisnis tercapai dengan didukung layanan bank yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya layanan berupa Produk pembayaran angsuran kredit debitur tanpa harus menyetor ke bank langsung (Virtual Account) sebagai wujud komitmen pelayanan nasabah yang telah dicanangkan sebelumnya. Layanan ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan layanan yang cepat, mudah dan efisien.

Dalam aspek operasional BPR Satya Mitra andalan tetap mengedepankan pola tata kelola efisiensi dan efektifitas di setiap bagian/unit terkait, dimana Hal ini telah terbukti dapat mengurangi beban operasional yang tidak perlu, sehingga

rasio BOPO tetap terjaga.

Untuk menempatkan rasio BOPO yang cukup, Bank Satya melakukan efisiensi disemua bagian, efektifitas dalam pekerjaan, serta mereposisi tugas dan wewenang karyawan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada Job desk pada unit/ bagian tersebut. Disisi lain, unit bisnis di pacu untuk menghasilkan portofolio yang bagus dan rasio CAR tetap berada di atas 12 % sekaligus NPL dibawah 5%.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, fungsi Bank satya sebagai perantara bagi pihak yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kondisi demi keberlangsungan usaha. Sehingga dapat secara terus menerus melayani nasabah dengan baik dan terus menjadi semakin baik. Oleh sebab itu Bank Satya harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank Satya menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika (tercantum dalam kode etik) dan *Good Corporate Governance*.

Melihat perjalanan bisnis pada tahun tahun sebelumnya dan melihat tantangan dan peluang ke depan, Bank Satya tetap menjadikan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam antara Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Provinsi Kepri umumnya dan Kota Batam khususnya. Dimana peningkatan wawasan dan pengetahuan karyawan di sektor Perbankan akan menjadikan Bank Satya unggul atau setidaknya lebih maju dalam hal pelayanan, karena kecendrungan saat ini untuk bunga dan biaya kredit hampir sama dan merata. Tinggal dibutuhkan kreatifitas dan pelayanan optimal untuk memenangi persaingan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Maka Bank Satya tetap mengedepankan lima asas atau pilar utama *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *Transparansi (transparency)*,

Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

**Kebijakan & Prosedur GCG** Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Satya Mitra Andalan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

**Tujuan Pelaksanaan GCG** di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.

- a. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- c. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- d. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- e. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

#### **Dasar Hukum Kebijakan GCG**

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah:

##### 1. Undang-Undang

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
- UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

##### 2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13./POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Buku Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006 – Komite Nasional Kebijakan Governance.

3. Anggaran Dasar PT BPR Satya Mitra Andalan dan Perubahannya.

### **Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) aspek berikut:

#### **1. Pelaksaaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.**

1.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi. Anggota Direksi lengkap.

Untuk Dewan Komisaris sudah lengkap sesuai ketentuan.

- Komisaris berjumlah 2 (dua) orang.
- Penambahan Calon Komisaris sesuai ketentuan dalam tahap pengajuan nama calon.
- Komisaris dan Direksi yang ada saat ini telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Antara Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1.2 Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah mendapat laporan dan evaluasi dari Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan komisaris secara berkala telah melakukan kunjungan terhadap debitur bank (on the spot) untuk mengevaluasi fasilitas kredit yang telah diberikan apakah sesuai dengan peruntukannya.

b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

1.3 Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris

Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut:

- Penyelesaian kredit hapus buku
- Persetujuan laporan keuangan tahunan periode 2018
- Persetujuan rencana bisnis bank 2019
- Skema Insentif pencapaian target 2019
- Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun 2019
- Pemberian insentif pengurus dan bonus karyawan 2018
- Kerugian pejualan AYDA dan hapus buku kredit tidak tertagih
- Persetujuan pejualan inventaris dan penghapusan inventaris yang habis nilai bukunya/rusak
- Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
- Biaya perjalanan dinas
- Permasalahan cover asuransi jaminan
- Penunjukan direksi yang membawahi Majajemen Resiko
- Penyesuain kode KLBI
- Pembahasan terkait imbalan pasca kerja
- Audit laporan kauangan tahun 2019 oleh KAP

## **2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

Dikaitkan dengan asset bank yang masih di bawah Rp.80.000.000.000,- maka BPR Satya Mitra Andalan tidak membentuk komite tersebut.

## **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

### **3.1 fungsi kepatuhan**

- Direktur merangkap kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur merangkap kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan,berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP),Peraturan OJK,peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

### 3.2 Fungsi Audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik.

- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), selanjutnya menuju kepada audit tiga bulanan, Audit semesteran, audit Tahunan dan Audit Khusus sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direksi dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direksi dengan Tembusan ke Dewan Komisaris secara efektif dan efisien.

### 3.3 Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Sandra Pracipta CPA yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan manajemen.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

## **4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

Penerapan GCG untuk Manajemen Resiko ini sudah mulai berjalan. BPR Satya juga telah melaporkan profil resiko kredit pertama kali pada semester kedua periode Juli s/d Desember 2019. dan selanjutnya secara berkala untuk resiko Kepatuhan dan Operasional. Untuk saat ini pengendalian internal dilakukan berdasarkan Job Description masing masing bagian dan double cross check dari atasan langsung. Penerapan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern diharapkan akan seutuhnya terlaksana di tahun berikutnya.

## **5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK**

- a. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- b. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar

diputuskan oleh Manajemen secara independen.

- c. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
- d. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No.	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	4	125.524.212,-

## 6. Rencana Bisnis Bank

### 6.1 Rencana Strategis jangka pendek periode 01 (satu) tahun:

- a. Berupaya meningkatkan volume usaha secara keseluruhan, baik dari penghimpunan dana, penyaluran kredit maupun kegiatan usaha lainnya yang mendukung usaha pertumbuhan bank.
- b. Berupaya menciptakan pproduk-produk baru yang inovatif, dan sesuai kebutuhan, khususnya yang dapat menghasilkan fee base income bagi bank.
- c. Membangun kerangka sistem informasi dan/ atau mini program yang dapat diaplikasikan dikemudian hari untuk menunjang kegiatan operasional dan pelayanan.
- d. Menyelesaikan dan/ atau menurunkan AYDA dan NPL.
- e. Mengembangkan struktur organisasi agar alur kerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- f. Penerapan Tata Kelola perusahaan secara maksimal.
- g. Meningkatkan kualitas SDM baik itu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan karyawan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.
- h. Menjalankan kegiatan operasional lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan teknologi informasi dan SOP yang memadai.

### 6.2 Rencana Strategis jangka menengah periode 03 (tiga) tahun

- a. Meningkatkan penguatan permodalan.
- b. Meningkatkan pangsa pasar dengan pengembangan Brand Image

secara berkesinambungan.

- c. Meningkatkan volume usaha dengan memperluas jangkauan layanan dengan ekspansi kantor pelayanan kas atau kantor cabang BPR.
- d. Meningkatkan layanan berbasis teknologi dengan menciptakan produk inovatifkerjasama pihak ketiga.
- e. Memelihara loyalitas nasabah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan bank.
- f. Penerapan Tata Kelola dan manajemen Risiko yang lebih maksimal sesuai dengan peraturan OJK dengan memperkuat lini pengawasan.
- g. Pengembangan kualitas SDM secara berkesinambungan.

### 6.3 Rencana Strategis jangka menengah periode 03 (tiga) tahun

- a. Menjadikan BPR Satya menjadi salah satu BPR yang profitable dan sehat dengan pengelolaan yang lebih terbuka dan accountable.
- b. Mejadikan BPR Satya menjadi salah satu BPR yang memiliki market Share 10 besar di kota Batam dengan meningkatkan kualitas produk layanan dan sistem pemasaran yang inovatif.
- c. Menjalankan kegiatan operasional lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan teknologi iformasi dan SOP yang memadai.

Target Jangka Pendek: .

- Menurunkan tingkat NPL Gross dari 4,25% per 31 Oktober 2018 menjadi 4,47% per 31 Desember 2019
- Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dari Rp.56.731.179 ribu pada Desember 2018 menjadi Rp. 61.731.379 ribu pada Desember 2019 antara lain:
  - Tabungan meningkat 68,90 % dari posisi Desember 2018 sebesar Rp.2.709.106 ribu menjadi Rp. 2.762.238 ribu pada Desember 2019.
  - Deposito meningkat 9.16% dari Rp.54.022.073 ribu pada Desember 2018 menjadi Rp.58.969.141 ribu pada Desember 2019.

- Meningkatkan penyaluran kredit sebesar Rp14.71% dari Rp.54.854.258 ribu per Desember 2018 menjadi Rp.62.922.211 ribu pada Desember 2019.
- Meningkatkan efisiensi, yang ditunjukkan dengan rasio BOPO turun dari 80,44 % menjadi 80,50%.
- Meningkatkan rasio permodalan dari 17.53 % pada Desember 2018 menjadi 19,45% pada Desember 2019.
- Meningkatkan Loan to Deposit Rasio dari 81,12% pada Desember 2018 menjadi 83,68% pada Desember 2019.

Target jangka menengah, dapat digambarkan secara umum:

- Pada tahun 2020 modal BPR ditargetkan mencapai RP.15.000.000.000,- yang berasal dari laba ditahan sebesar Rp.6.000.000.000,-
- Menerapkan Tata Kelola sesuai dengan POJK No.04/POJK.03/2015
- Menerapkan Manajemen Resiko sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2015, antar lain memiliki struktur organisasi untuk menjalankan fungsi Manajemen Resiko, mengelola Resiko Operasional, Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, Resiko Kepatuhan.

#### 7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

- a) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- b) Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya secara bertahap kedepannya.
- c) Pembuatan *Home Page* PT. BPR Satya Mitra Andalan, dan bergabungnya di beberapa media sosial seperti Facebook, instagram, yang dijalankan sesuai dengan ketentuan.
- d) Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
- e) PT. BPR Satya Mitra Andalan menyampaikan laporan GCG kepada

Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Satya Mitra Andalan.

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan.

tidak memiliki saham pada PT. BPR lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Satya	Jabatan BPR Lain	Jabatan Perusahaan Lain	P,Saham BPR/Perusahaan Lain	Bidang Usaha
Tri Siska Yuliana	Komisaris	Tidak ada	Accounting & Finance	Tidak ada	Kontraktor Umum
Harryanto	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Erwin	Dirut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hendri	Dir rangkap Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

### Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

#### a. Hubungan Keuangan

- Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali bank.

#### b. Hubungan Keluarga

Komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
Tri Siska Yuliana	Komisaris		√		√	√			√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
Harryanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
Erwin	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
?	Direktur Rangkap Kepatuhan		√		√		√		√		√		√

## 2. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Paket remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 1.879.539.952,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp. 44.804.942,- terlihat pada tabel berikut ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji dan penghasilan tetap lainnya, tantiem dll)		Rp. 625.688.500,-		Rp. 1.253.851.452,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura/ non natura (fasilitas tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll)	2	Rp. 7.254.000,-	2	Rp. 37.550.942,-
Total	2	Rp 632.942.500,-	2	Rp. 1.291.402.394,-

Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam 1 tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan:

Tingkat penghasilan dalam 1 (satu) tahun	Jumlah direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp. 500jt - 1 miliar	2	-
Rp. 500 juta kebawah	-	2

## 3. Share Option

Sampai saat ini tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui

penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

#### 4. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,35 x
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,05 x
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 2,38 x
- d. Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan komisaris tertinggi = 1,23 x
- e. Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi = 4,12 x

#### 5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun.

#### Rapat Komisaris

No.	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Pembahasan: Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, isu- isu strategis BPR mengenai SDM, masalah perpajakan, permasalahan fasilitas kredit, peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019.	14 Februari 2019	Dewan Komisaris & Direksi

2	<p>Pembahasan:</p> <p>Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, pembahasan progres penyelesaian NPL, pembahasan mengenai SDM, permasalahan lainnya.</p>	06 Mei 2019	Dewan Komisaris & Direksi
3	<p>Pembahasan:</p> <p>Evaluasi hasil pemeriksaan umum BPR oleh OJK, pembahasan permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR.</p>	17 Juni 2019	Dewan Komisaris & Direksi
4	<p>Pembahasan:</p> <p>Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR, perkembangan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko, pembahasan AYDA, NPL dan pemantauan terhadap debitur yang telah dihapusbukukan, pembahasan mengenai laporan kegiatan, permasalahan, perkembangan permasalahan dan strategi pengembangan.</p>	23 Juli 2019	Dewan Komisaris & Direksi
5	<p>Pembahasan:</p> <p>Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, pembahasan rencana tindak penyelesaian NPL, pembahasan mengenai laporan kegiatan dan strategi pengembangan.</p>	12 November 2019	Dewan komisaris & Direksi

**Data kehadiran rapat Dewan Komisaris:**

No.	Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Hadir
1	Tri Siska Yuliana	5	5	100%
2	Harryanto	5	5	100%

**6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2019 adalah tidak ada /tidak pernah terjadi.

**7. Permasalahan**

Tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

No.	Kasus		Keterangan
	Perdata	Pidana	
1	-	-	-

**8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

**9. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik**

Tidak ada Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2019 dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Satya Mitra Andalan.

**Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.**

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan. periode 31 Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Nilai Komposisi GCG sebesar 1,93 dengan predikat Baik.
- b) Peringkat masing-masing per faktor adalah:

<b>No.</b>	<b>Aspek yang Dinilai</b>	<b>Bobot</b>	<b>Penilaian Faktor</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	0,39
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	0,33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi Komite	0.00%	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0,22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0,22
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0,22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0,06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	0,00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0,16
10	Rencana Bisnis BPR	7,50%	0,17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan	7,50%	0,16
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100%</b>	<b>1,93</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

### **Kekuatan Pelaksanaan GCG**

- Dengan disusunnya sebagian besar SOP GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Satya Mitra Andalan tahun buku 31 Desember 2019.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Satya Mitra Andalan

Tri Siska Yuliana

Komisaris Utama

Erwin

Direktur